



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARYONO WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 500231

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.423.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/84 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 136.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 137.500.000
3. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 337.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 338.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **132.650.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT NF100 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000



3. MOTOR, HONDA E1FO2N12M2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28LO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
5. MOTOR, HONDA A1F02N37M1A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	64.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.105.941
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.649.055.941
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.649.055.941

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.